



Fungsional Struktural Parson dalam Perubahan Sosial Desa Ponggok: Telaah Linimasa 2009 – 2023

Iqmal Maulana Z^{1*}, Zahran Fauzi H², Yilmaz Omar S³, Ahsan Syamil R⁴, Dede Sri Kartini⁵

¹⁻⁵ Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

iqmal22001@mail.unpad.ac.id^{1*}, fauzih364@gmail.com², yilmaz22001@mail.unpad.ac.id³,
ahsansyamil.r@gmail.com⁴, dede.sri.kartini@unpad.ac.id⁵

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Korespondensi penulis: iqmal22001@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *This study analyzes social change in Ponggok Village, Klaten, Central Java, from an impoverished village to a self-sufficient one, utilizing Talcott Parsons' structural functionalist framework and the AGIL model (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Prior to 2006, Ponggok Village faced poverty, inadequate infrastructure, and limited employment opportunities, despite its significant potential for spring water. The transformation began in 2009-2013 with collaboration between the village head and academics for potential mapping and the establishment of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Tirta Mandiri. The period from 2014 to 2018 marked a "golden era" with the implementation of the Village Law of 2014, increased village funds, and peak revenues from Umbul Ponggok. However, from 2019-2023, the village experienced a significant decline due to the COVID-19 pandemic. A descriptive qualitative research method with a case study approach was employed, dividing the timeline into three periods (2009-2013, 2014-2018, 2019-2023). Data were collected through Focus Group Discussions, interviews, and literature reviews. The research findings demonstrate how Ponggok Village systematically fulfills the AGIL functional prerequisites by examining socio-economic policies through policies implemented by the Village Government, Village Consultative Body (BPD), and Village-Owned Enterprise (BUMDes) in efforts to improve quality of life, foster social integration among stakeholders, and maintain values through sustainable programs aimed at achieving and sustaining the success of its transformation. These findings provide a holistic understanding of the village's resilience and adaptability in facing social and economic challenges.*

Keywords: *Adaptation; Goal Attainment; Integration; Latency; Social Changes*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perubahan sosial di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, dari desa miskin menjadi desa mandiri, menggunakan kerangka fungsional struktural Talcott Parsons dan model AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Sebelum tahun 2006, Desa Ponggok menghadapi kemiskinan, infrastruktur buruk, dan minimnya lapangan kerja meskipun memiliki potensi sumber mata air. Transformasi dimulai pada 2009-2013 dengan kolaborasi antara kepala desa dan akademisi untuk pemetaan potensi dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri. Periode 2014-2018 merupakan "era keemasan" dengan adanya Undang-Undang Desa 2014, peningkatan dana desa, dan pendapatan Umbul Ponggok yang mencapai puncaknya. Namun, pada 2019-2023, desa mengalami kemerosotan signifikan akibat pandemi COVID-19. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan pendekatan studi kasus, membagi linimasa menjadi tiga periode (2009-2013, 2014-2018, 2019-2023). Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Desa Ponggok secara sistematis memenuhi prasyarat fungsional AGIL dengan mengkaji kebijakan ekonomi-sosial melalui kebijakan Pemdes, BPD, BUMDes dalam upaya untuk peningkatan kualitas hidup, integrasi sosial antar pemangku kepentingan, dan pemeliharaan nilai melalui program berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan transformasinya. Temuan ini memberikan pemahaman holistik tentang ketahanan dan adaptabilitas desa dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Adaptasi; Integrasi; Latensi; Pencapaian Tujuan; Perubahan Sosial

1. LATAR BELAKANG

Desa pongkok, pada awalnya merupakan desa miskin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelum 2006, desa pongkok menghadapi berbagai banyak masalah seperti kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan minim lapangan pekerjaan. Padahal desa pongkok ini mempunyai sumber mata air sebagai potensi yang besar, namun hanya digunakan untuk mandi dan mencuci oleh masyarakat desa. Kemudian setelah 2006, tepatnya setelah perubahan kepala desa menjadi Junaedi Mulyono, Ia berkolaborasi dengan akademisi sekitar 2007 hingga 2009. Disitu kerjasama tersebut menghasilkan perencanaan dan pemetaan *roadmap* desa pongkok. Selanjutnya di sekitar 2009 - 2013, desa pongkok mulai menjalankan *roadmap* yang sebelumnya telah dibuat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri (BUMDes) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selanjutnya di sekitar 2014 - 2018, dimana tahun 2014 ini terciptanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan juga UU ini sebagai titik balik untuk desa-desa di Indonesia. selain itu, tahun 2014 - 2018 juga bisa dibilang sebagai era “keemasan” desa pongkok. Karena pada era tersebut desa pongkok mendapat dana desa yang berasal dari APBN serta pendapatan umbul pongkok pada tahun 2017 mencapai 14,6 miliar dan sekitar 40%-nya diberikan kepada pemdes sebagai pendapatan asli desa (PAD). Selanjutnya di sekitar 2019 - 2023, desa pongkok mengalami kemerosotan yang signifikan diakibatkan oleh COVID-19, disini pendapatan pongkok terbilang sangat kecil karena pada tahun 2020 pendapatan umbul pongkok kurang dari 500 juta, jika dibandingkan dengan tahun 2017 atau 2018 pendapatan tersebut terbilang kecil. Transformasi ini, tidak terjadi secara acak karena melalui serangkaian inisiatif yang terstruktur dan melibatkan pemimpin, inovasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Fenomena tersebut menarik dikaji karena adanya perubahan sosial yang terjadi serta bisa dikaitkan dengan teori yang dikeluarkan oleh Talcott Parson mengenai fungsionalisme struktural. Sistem ini terdiri dari banyak subsistem yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menciptakan stabilitas sosial. Setiap struktur masyarakat melakukan tugas tertentu yang sangat penting untuk kelangsungan sistem secara keseluruhan, dimana Untuk mencapai ekuilibrium baru, komponen tertentu harus disesuaikan atau disesuaikan dengan yang lain.

Disini desa pongkok sebagai sebuah sistem sosial dan analisisnya akan difokuskan pada kerangka AGIL dari Talcott Parson. Kerangka kerja ini diidentifikasi memiliki empat prasyarat yang harus dipenuhi sebagai sistem sosial, yaitu: (1) *Adaptation* (2) *Goal Attainment* (3) *Integration* (4) *Latency*. Kerangka Parson ini memberikan perspektif yang kuat untuk memahami bagaimana sistem sosial seperti komunitas desa diatur dan dikelola untuk mengalami transformasi yang terstruktur daripada kekacauan.

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai contoh untuk desa atau pembuat kebijakan lain dalam mengembangkan program pembangunan desa. Dengan memahami betapa pentingnya untuk menyelaraskan fungsi adaptasi ekonomi, kepemimpinan politis, integrasi sosial, dan pemeliharaan nilai, strategi pembangunan dapat dibuat secara lebih luas dan tidak terbatas pada satu aspek. Selain itu, dapat memberikan pemahaman mengenai kesuksesan desa ponggok ini tidak hanya terfokus di satu aspek seperti kepala desa atau BUMDes, namun memberikan penjelasan struktural tentang cara masyarakat Ponggok secara sistematis memenuhi persyaratan fungsional, yang memungkinkan keberhasilan terjadi dan berlanjut.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini menganalisis perkembangan Desa Ponggok sebagai sistem sosial yang fungsional dari tahun 2009 hingga 2023. Tujuan ini terbagi menjadi empat bagian. Pertama, untuk mengetahui bagaimana desa ponggok dalam fungsi *Adaptation* dari fase pembentukan BUMDes hingga bertahan pada fase pandemi *Covid-19*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana desa ponggok dalam fungsi *Goal Attainment*. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana desa ponggok dalam fungsi *Integration* kolaborasi antar stakeholder di 3 fase (2009 - 2013, 2014 - 2018, 2019 - 2023). Keempat, untuk mengetahui bagaimana desa ponggok dalam fungsi *Latency* melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah ada.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis fungsionalisme struktural dalam teori sosiologi tidak terdiri dari eksposisi tunggal, terpadu, dan konsisten. Penulis yang berbeda memberikan penekanan yang berbeda, menggunakan terminologi yang agak berbeda, dan memasukkan fenomena yang berbeda di bawah berbagai istilah yang serupa. Daripada mencoba untuk membahas secara dangkal berbagai macam teori yang menulis dari perspektif ini, kami akan berfokus terutama pada konsep-konsep utama dalam karya yang mungkin merupakan pendukung paling terkemuka dari pendekatan ini dalam karya sosiologi terkini Talcott Parsons dan, pada gilirannya, membahas relevansi kerangka ini untuk pendidikan dan praktik kerja sosial. Melihat pendekatan sistem Parsonian dari perspektif umum, hubungan dekat dengan tradisi sosiologi lama organikisme dapat dicatat. Artinya, gagasan tentang sistem organik digeneralisasikan ke fenomena sosial dan dijadikan fokus teoritis utama tanpa, dalam prosesnya, dikaitkan dengan situasi historis tertentu. Singkatnya, "sistem" abstrak didalilkan di mana fenomena sosial dan budaya ditangani secara konseptual dan "sistem" ini dianggap analog dengan organisme biologis. Lebih jauh, sistem tersebut dipahami sebagai "pemeliharaan batas" dan "pemeliharaan struktur." Artinya, sistem tersebut dipandang mampu menahan kekuatan eksternal dan

mempertahankan tingkat stabilitas dan struktur yang cukup besar agar tetap menjadi sebuah sistem. Seperti yang dikatakan Parsons:

"Konsep sistem terbuka yang saling bertukar dengan sistem lingkungan juga menyiratkan batas-batas dan pemeliharaannya. Ketika sekumpulan fenomena yang saling bergantung menunjukkan pola dan stabilitas yang cukup pasti dari waktu ke waktu, maka kita dapat mengatakan bahwa ia memiliki "struktur" dan bahwa adalah bermanfaat untuk memperlakukannya sebagai sebuah "sistem"...Sejauh batas-batas dalam pengertian ini tidak ada, tidak mungkin untuk mengidentifikasi sekumpulan fenomena yang saling bergantung sebagai sebuah sistem."

Dalam teori parson tersebut dapat diaplikasikan untuk menerangkan perubahan-perubahan masyarakat pada badan-badan pemerintahan. Dalam artikel ini, kami menggunakan pendekatan yang dianut oleh Talcott Parsons pada tahun 1959 mengenai persepsi pemberdayaan sosial ponggok, yang dibangun dari Teori Struktural-Fungsional untuk analisis sosial yang diajukannya pada tahun 1951, sebagai contoh penggunaan model fungsionalisme struktural dalam rangka mengkaji perubahan-perubahan sosial ponggok.

Bagi Parsons, teori tindakan bergabung dengan dua kelas besar sistem teoritis lainnya, alam, dan budaya. Tindakan sosial digambarkan sebagai interaksi antara dua (atau lebih) pelaku organik dalam konteks lingkungan fisik dan budaya yang relevan. Parsons berpendapat bahwa kepribadian merupakan perhatian psikologi yang tepat dan sosiologi hanya perlu mengambil darinya apa yang berkaitan dengan interaksi sosial. Sigmund Freud (1856–1939) adalah sumber utama teori dan wawasan psikologisnya. Demikian pula, ia menganggap budaya sebagai perhatian antropologi. Interaksi sosial antara kepribadian dalam suatu budaya merupakan fokus sosiologinya.

Dalam konteks tindakan, tiga kelas objek diidentifikasi: fisik, kultural, dan sosial. Objek fisik adalah entitas empiris, yang tidak “berinteraksi” dengan atau “merespons” aktor sosial. Objek kultural adalah elemen simbolis dari tradisi budaya. Objek sosial adalah aktor, aktor yang menjadi fokus (ego), aktor relevan lainnya (alter) atau kolektivitas aktor yang diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk tujuan analisis. Tindakan adalah proses yang berdampak pada pencapaian kepuasan atau penghindaran kekurangan aktor yang relevan. Diasumsikan bahwa sumber energi atau “usaha” utama dalam tindakan berasal dari aktor yang termotivasi (organisme perilaku) (Parsons, 1968, hlm. 4).

Pengorganisasian unsur-unsur tindakan ini merupakan fungsi dari hubungan aktor dengan situasinya dan sejarah hubungan tersebut, dengan kata lain, dengan pengalamannya. Tindakan yang didefinisikan dengan demikian tidak hanya terdiri dari "respons" ad hoc

terhadap "stimuli" situasional tertentu, aktor juga mengembangkan sistem "harapan" yang relatif terhadap berbagai objek fisik, budaya, dan sosial dari situasi tersebut. Dalam kasus interaksi dengan objek sosial, dimensi lebih lanjut ditambahkan. "Bagian dari harapan ego terdiri dari reaksi yang mungkin terjadi dari perubahan terhadap tindakan ego yang mungkin, reaksi yang diantisipasi sebelumnya dan dengan demikian mempengaruhi pilihan ego sendiri". Dengan demikian, Parsons membangun perilaku bermain ke dalam konsepsinya tentang tindakan.

Jika suatu sistem sosial hendak membentuk tatanan yang terus-menerus atau menjalani proses perubahan perkembangan yang teratur, prasyarat fungsional tertentu harus dipenuhi. Seperti yang telah kita lihat, sistem tindakan terstruktur berdasarkan tiga fokus integratif, yaitu aktor individual, sistem interaktif antara aktor, dan sistem pola budaya. Parson berpendapat bahwa masalah fungsional dasar dari suatu sistem hubungan sosial yang teratur mendefinisikan serangkaian keharusan yang memiliki yang akan dikenakan pada variabilitas sistem sosial jika kondisi minimum stabilitas ingin dipenuhi (Parsons, 1985, hal. 27):

1. Suatu sistem sosial tidak dapat disusun sedemikian rupa sehingga secara radikal tidak sesuai dengan kondisi berfungsinya masing-masing aktor individu sebagai organisme biologis dan sebagai kepribadian, atau dengan integrasi sistem budaya yang stabil.
2. Sistem sosial harus memiliki proporsi aktor yang cukup dan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan persyaratan sistem perannya dengan memenuhi harapan dan menghindari perilaku mengganggu dan menyimpang.
3. Sistem sosial harus menghindari komitmen terhadap pola budaya yang memberikan tuntutan mustahil kepada orang-orang dan karenanya menimbulkan penyimpangan dan konflik.

Sumber-sumber gangguan yang potensial meliputi masalah peluang, masalah gengsi, dan masalah kekuasaan. Tindakan yang mengganggu dapat berupa tindakan mengganggu yang positif atau sekadar penarikan diri dari pelaksanaan kewajiban. Segala macam perilaku mengganggu dapat terjadi, tetapi ini hanya menjadi masalah jika kecenderungan ini menjadi terorganisir menjadi subsistem sedemikian rupa sehingga mempengaruhi titik-titik strategis sistem sosial itu sendiri. Misalnya, Anda dapat mengharapkan beberapa pelanggaran hukum, tetapi gerakan massa yang berkembang atau geng kriminal merupakan ancaman.

Untuk menggabungkan beberapa proposisi tentang tujuan yang mungkin dikejar oleh para aktor dalam teori tindakannya, Parsons menggunakan beberapa eksperimen tentang kepemimpinan dalam kelompok kecil yang dilakukan oleh Robert Bales. Bales mengamati perubahan dalam aktivitas saat kelompok kecil mencoba memecahkan masalah tugas mereka.

Kelompok tersebut mungkin mulai dengan mengembangkan orientasi umum terhadap tugas tersebut. Mereka kemudian dapat mencoba memecahkan masalah pengambilan keputusan. Mereka selanjutnya mungkin mencoba mencapai tingkat konsensus. Siklus tersebut, jika berhasil, dapat diakhiri dengan aktivitas mengekspresikan kepuasan terhadap proses dan hasilnya. Melihat aktivitas kelompok sebagai sistem sosial, dapat dilihat bahwa pertemuan yang khas menghadirkan empat masalah struktural utama kepada kelompok tersebut, "masalah adaptasi terhadap kondisi situasi eksternal, kontrol instrumental atas bagian-bagian situasi dalam kinerja tugas berorientasi tujuan, pengelolaan dan ekspresi sentimen dan ketegangan para anggota, dan pemeliharaan integrasi sosial para anggota satu sama lain sebagai kolektivitas yang solid" (Parsons et al 1991, hlm. 64). Parsons mengonseptualisasi ulang kategori-kategori ini menggunakan variabel pola dan kemudian menerapkannya tidak hanya pada kelompok kecil tetapi juga pada semua sistem tindakan. Empat aktivitas yang dihasilkan, Adaptasi, Pencapaian tujuan, Integrasi dan Pemeliharaan pola laten–manajemen ketegangan, secara umum disebut sebagai model AGIL; aktivitas-aktivitas ini juga disebut sebagai keharusan fungsional atau masalah sistem dari sistem sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana, ketika terjadi perubahan di satu bagian sistem, keseimbangan sosial dipertahankan atau dipulihkan melalui penyesuaian di bagian lain.

Aktivitas adaptasi mengamankan sumber daya sistem dari lingkungan dan mendistribusikannya ke subsistem lainnya. Aktivitas pencapaian tujuan melibatkan mobilisasi upaya para pelaku untuk mencapai tujuan sistem dan menetapkan prioritas. Aktivitas integrasi mengoordinasikan, menyesuaikan, dan mengatur hubungan di antara berbagai pelaku dan kolektif dalam sistem melalui penerapan norma. Aktivitas pengelolaan ketegangan-pemeliharaan pola laten memastikan bahwa nilai-sikap (sikap budaya) dipertahankan dan setiap ketegangan yang timbul ditangani untuk memastikan motivasi bagi semua aktivitas sistem. Istilah latensi mengacu pada fakta bahwa polanya tidak terlihat jelas. Keempat aktivitas AGIL memotivasi dan menstabilkan seluruh sistem sosial. Kebutuhan fungsional AGIL adalah apa yang perlu ditangani oleh setiap sistem tindakan untuk menjaga keseimbangan. Parsons dan rekan-rekannya membayangkan proses perubahan akan melalui serangkaian fase (Parsons et al., 1991): misalnya, urutan fase Bagi Parsons, ada empat keharusan fungsional yang diperlukan dan menjadi ciri khas sistem apapun: (A) Adaptasi, (G) Pencapaian Sasaran, (I) Integrasi, dan (L) Latensi atau Pemeliharaan Pola (AGIL). Oleh karena itu, suatu sistem harus menjalankan keempat fungsi ini agar dapat bertahan hidup.

Dalam *the social system*, Parsons mengemukakan perspektif sistemik tentang pemberdayaan sosial ponggok, dimana Sistem Kepribadian, Sistem Perilaku, Sistem Sosial,

dan Sistem Budaya dipahami sebagai subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu Sistem Aksi Sosial. Parsons memahami Sistem Kepribadian sebagai sistem yang mengatur tindakan manusia sehingga mereka dapat mencapai tujuan tertentu melalui kemampuan untuk memutuskan dan bertindak. Dengan demikian, Sistem Kepribadian terkait dengan Sistem Perilaku karena merupakan hal yang mendasar bagi pengembangan perubahan sosial dan pemberdayaan sosial.

Sebaliknya dalam Sistem Sosial Desa Ponggok, Peran Sosial Pemerintah desa (aktor-aktor desa seperti BPD, PEMDES, BUMdes dan pemangku kepentingan di desa), dan harapan-harapan masyarakat menyatu, yang sekaligus memuat kepentingan-kepentingan masyarakat dan rakyat Ponggok serta ketentuan-ketentuan para pemilik kekuasaan (Parsons et al. 36). Sistem Sosial tersebut, sebagaimana dapat kita lihat, memadukan agenda sosial dan pembangunan Ponggok ke dalam struktur peran sosial melalui hubungan afektif, melalui hubungan aktor-aktor desa seperti BPD, PEMDES, BUMdes dan pemangku kepentingan di desa dengan masyarakat, yang terlibat dalam penerapan atau yang terpengaruh oleh program pengembangan perubahan sosial dan pemberdayaan sosial, serta peluang yang dihadirkan oleh perubahan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis kapabilitas aktor Desa Ponggok dalam mengontrol perubahan sosial dan ekonomi selama periode 2008–2023, yang dibagi menjadi tiga lini masa: (1). Linimasa pertama, tahun 2009 hingga 2013 untuk menggambarkan era perencanaan pemetaan dan pembangunan desa Ponggok; (2). Linimasa kedua, tahun 2014 hingga 2018, menggambarkan pelaksanaan pemetaan dan perencanaan desa Ponggok; (3). Linimasa ketiga, tahun 2019 hingga 2023, menggambarkan adaptabilitas desa Ponggok di era COVID-19 dan revitalisasi pasca COVID-19. Penelitian ini menggunakan teori Structural Functionalism Talcott Parson untuk menelaah hubungan aktor dalam mengukur kapabilitas aktor dalam perumusan kebijakan. Melalui Focus Group Discussion, wawancara dan studi literatur, penelitian ini menggali lebih jauh mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemetaan dan pembangunan desa Ponggok, serta adaptabilitas desa Ponggok di era COVID-19 dan revitalisasi pasca COVID-19. Data kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang kapabilitas aktor desa Ponggok dalam mengontrol perubahan sosial dan ekonomi dalam tiga linimasa tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Perencanaan dan Pemetaan 2009 - 2013

Pada masa awal perencanaan Desa Ponggok tentunya menjadi suatu tantangan yang disebabkan belum adanya kegiatan yang seperti ini sebelumnya, dalam perjalanannya untuk keluar dari predikat Desa Miskin pada saat itu Kepala Desa meminta bantuan kepada mahasiswa semenjak tahun 2008 sampai tahun 2009 untuk melakukan pemetaan terhadap potensi Desa Ponggok agar bisa mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Ponggok untuk selanjutnya dilakukan perencanaan untuk pengembangan Desa agar bisa mengalami kemajuan dan keluar dari desa miskin. Pada perkembangannya setelah dilakukannya pemetaan potensi yang dimiliki oleh desa ponggok didapati bahwa desa memiliki potensi berupa sumber mata air atau biasa disebut oleh masyarakat umbul, umbul inilah yang akhirnya dijadikan sebagai objek wisata untuk meningkatkan pendapatan desa untuk menuju sebuah kemajuan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan untuk keluar dari predikat desa miskin yang melekat pada saat itu. Pada pengembangan perencanaan inilah tentunya dibutuhkan satu individu yang memimpin untuk perjalanan perubahan yang ada pada saat itu, aktor yang sangat berperan dalam perubahan yang terjadi di Desa Ponggok adalah Kepala Desa yang baru saja terpilih pada tahun 2007 yang menjadi aktor dari perubahan yang terjadi dan masih bisa dirasakan oleh masyarakat desa ponggok saat ini, seorang aktor tentu diperlukan untuk menuju perubahan yang terjadi namun perubahan yang terjadi juga belum tentu kearah yang lebih maju tetapi juga bisa terjadi perubahan yang lebih buruk nantinya. Namun perubahan yang terjadi di Desa Ponggok menuju kearah yang lebih baik dan mampu untuk melepaskan predikat Desa Miskin yang melekat pada Desa Ponggok, seorang aktor juga dibantu dengan beberapa hal yang mendukung ide dan gagasan untuk menuju perubahan baik secara ekonomi maupun perubahan masyarakat yang mengubah kehidupan bersosial masyarakat.

Pemerintah Desa setelah dilaksanakannya pemetaan potensi ini mulai menyusun beberapa program kedepannya dan mulai untuk mengintegrasikan lembaga yang ada di desa untuk bersama-sama bersinergi untuk kemajuan desa di beberapa waktu yang akan datang, setelah adanya hasil pemetaan potensi yang dilakukan oleh mahasiswa UGM dan mengetahui bahwa mereka bisa untuk memanfaatkan umbul sebagai objek wisata, pemdes bersama dengan BPD memberitahukan perihal ini kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar semua masyarakat bisa mengetahui hal tersebut dan diharapkan semua lapisan masyarakat dapat bekerja sama untuk mendukung program pemanfaatan umbul melalui objek wisata dan diharapkan kemudian hari dapat berkembang dan Desa Ponggok dapat dijadikan sebagai Desa Wisata yang akan menjadi salah satu destinasi yang banyak didatangi oleh wisatawan dan dari

situ juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian desa agar masyarakat dapat berkembang kualitas hidupnya. Setelah dilakukannya integrasi antar lembaga dan dilakukannya musyawarah tersebut maka pada tanggal 14 Desember 2009 melalui Peraturan Desa Ponggok No.06 Tahun 2009 BUMDes Tirta Mandiri secara resmi berdiri yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes tersebut sebagai badan usaha yang akan mengelola potensi desa yang ada khususnya umbul, maka dari itu semua lapisan masyarakat diarahkan untuk menjadi pengelola BUMDes agar mereka bisa dapat menerima gotong royong dalam mengelola dan memanfaatkan potensi karena mereka mengetahui kondisi sosial masyarakat desa dan mengetahui tentang keadaan di lapangan secara menyeluruh, dengan adanya BUMDes ini juga tidak semua masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut namun di kemudian hari semua masyarakat kebijakan tersebut dan bersinergi bersama untuk membangun desa ponggok agar bisa meningkat perekonomian mereka dan kesejahteraan dari masyarakat dapat tercapai di Desa Ponggok.

Dalam perkembangan awal BUMDes tentunya tidak semua berjalan sesuai dengan harapan yang dimiliki, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai pengelolaan sebuah badan usaha dan bagaimana cara mereka dalam mengelola sebuah objek wisata dan maka dari itu melalui kerjasama yang dilakukan dengan BNI dilakukan pelatihan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan sebagai sebuah badan usaha yang masih dilakukan sampai saat ini, karena dalam sebuah badan usaha pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk menilai kemajuan dari badan usaha dan juga agar mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang ada dan juga agar bisa untuk mengalokasikan dana yang didapat agar bisa terus berjalan. Dan juga tidak hanya itu saja pemdes melakukan pelatihan UMKM kepada masyarakat yang memiliki usaha agar mereka bisa untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki untuk memunculkan inovasi dan mempunyai latar belakang dalam segi bisnis karena dalam mengembangkan sebuah usaha tidak hanya membutuhkan inovasi tetapi juga keterampilan yang mereka miliki dan juga pengetahuan dalam segi bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar agar mereka bisa untuk mengembangkan usaha mereka dan juga agar mereka bisa untuk manajemen keuangan yang baik untuk keberlangsungan usaha mereka di kemudian hari.

Selain itu juga BUMDes melakukan kerjasama dengan desa sekitar untuk mengurangi daya saing yang bisa bersifat negatif dan akan merugikan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, selain itu juga BUMDes melakukan kerjasama dengan Yogyakarta untuk mengembangkan Desa Wisata dan mampu untuk mengemas perjalanan ke Desa Wisata ke dalam berbagai paket yang nanti akan dipilih oleh wisatawan agar mereka dapat mendapatkan

sensasi yang ingin mereka rasakan dalam berkunjung ke Desa Ponggok, selain itu juga BUMDes mencanangkan untuk mengembangkan paket Desa Studi yang akan mereka keluarkan di kemudian hari untuk digulirkan dan menyasar kepada para pelajar agar mereka tidak hanya berlibur tetapi mendapatkan sebuah pembelajaran yang akan mereka dapatkan di Desa Ponggok. Selain itu juga BUMDes memberikan penjelasan bahwa mereka ingin melakukan pengembangan Desa Wisata dan mengharapkan sinergi semua lapisan masyarakat agar dapat membantu pengembangan Desa Wisata di kemudian hari dan dapat meningkatkan perekonomian desa yang juga dapat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan semua rencana yang mereka miliki infrastruktur menjadi sebuah hal penting yang tidak boleh luput oleh pemdes, oleh karena itu peningkatan infrastruktur dilakukan untuk menunjang semua rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Ponggok dan juga untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang akan datang, jika mereka mendapatkan kenyamanan dalam melakukan kunjungan tentunya mereka memberikan rekomendasi kepada kolega mereka dan juga mereka akan datang kembali kemudian hari. Dalam masa perencanaan tentunya belum sempurna dalam penyusunannya masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk pertama kali dalam kehidupan mereka, tetapi ini juga akan terbayar di kemudian hari agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang selama ini belum mereka capai dan juga meningkatkan perekonomian bukanlah sesuatu yang mudah dalam perjalanannya, Desa Ponggok mungkin akan menjadi percontohan bagaimana mereka keluar dari predikat desa miskin yang melekat pada desa tersebut pada beberapa waktu kebelakang.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Desa Ponggok dan pengintegrasian antar lembaga desa dan munculnya sebuah badan usaha yang akan mengelola potensi desa untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata dan diharapkan untuk meningkatkan perekonomian desa, maka selanjutnya pemerintah bersama dengan masyarakat bekerjasama untuk meningkatkan potensi tersebut melalui BUMDes Tirta Mandiri agar mereka bisa untuk segera melakukan plan mereka kedepannya agar bisa untuk segera terjadinya perubahan di Desa Ponggok. Dalam prose pembangunan juga menjadi sulit karena dalam perencanaan pada linimasa ini menjadi titik penting bagi desa dalam mereka bergerak di waktu yang akan datang agar perencanaan yang sudah disusun dapat terlaksana di waktu yang tepat untuk membangun keberlangsungan pembangunan yang terjadi secara terus menerus untuk mendorong peningkatan pendapatan mereka dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Ponggok.

Masa Pelaksanaan 2014 - 2018

Memasuki linimasa kedua, disini merupakan sebagai era “keemasan” serta titik balik desa karena adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada era ini, UU No 6 Tahun 2014 hadir untuk memperkuat otoritas penyelenggaraan pemerintahan desa. UU ini menjelaskan bahwa desa memiliki otoritas sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai peraturan perundangan dan pemerintah pusat, kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Pada tahun 2015 desa ponggok mulai menerima dana desa yang bersumber langsung dari APBN sebesar 270 juta dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sanitasi, dan MCK sebanyak 50 unit. Pada tahun 2016, anggaran meningkat menjadi Rp 622 juta dan tetap digunakan untuk infrastruktur dasar. Pada tahun 2017, anggaran meningkat menjadi Rp 634 juta dan digunakan untuk membangun saluran drainase sepanjang 504 meter, infrastruktur jalan sepanjang 136 meter, dan 945 meter area parkir untuk mendukung pariwisata. Dana desa juga digunakan untuk memberikan bantuan berupa peralatan membuat produk makanan olahan khas desa maupun buah tangan untuk oleh-oleh wisatawan yang berkunjung. Selain itu, memperbaiki lingkungan dan melakukan perbaikan beberapa rumah masyarakat desa, dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat desa. Dana desa juga digunakan untuk pelatihan, workshop, bantuan modal dan bantuan alat, dengan tujuan menciptakan UKM desa.

Pemdes ponggok juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Salah satu contohnya adalah kursus bahasa inggris bagi siswa SLTP/SLTA yang berprestasi sebagai *tour guide* pariwisata. Selain itu dari hasil FGD, di tahun 2018 pemdes bersama BPD merumuskan program “Satu Rumah Satu Sarjana”. Setiap mahasiswa yang mengikuti program ini, mendapat dana sebanyak 300 ribu rupiah per bulan. Jika ditotalkan dengan jumlah partisipan, pengeluaran desa untuk anggaran program ini sebesar 80 juta per tahun. Manfaat dari program ini bagi desa, berupa pengabdian penerima program dengan disertai inovasi. Salah satu contoh nyata yaitu Bagus Dwi Raharja, narasumber ini mengelola media sosial Desa Ponggok yang diberi nama “Ponggok Kreatif” dengan membuat konten Instagram dan Tiktok terkait Umbul Besuki, Bumdes, dan Pemerintah Desa. Hal ini cukup membawa pengaruh positif dalam meningkatkan *awareness* dan menarik minat masyarakat luar untuk berkunjung ke Desa Ponggok.

Pemdes ponggok juga membangun sinergi antara pemdes, lembaga desa, dan masyarakat untuk menjadi tim perencana. Tim perencana ini dibagi menjadi 5 peran, yaitu:

1. *Driver*

Perannya disini adalah memberikan arah dan mengembangkan gagasan, serta menemukan hal-hal baru.

2. *Planner*

Perannya disini adalah menghitung kebutuhan tim, merencanakan strategi, dan menyusun jadwal.

3. *Enable*

Peran-nya disini adalah ahli memecahkan masalah, mengelola sarana atau sumber daya, menyebarkan gagasan, melakukan negosiasi.

4. *Exec*

Perannya disini adalah bekerja dengan menghasilkan output, mengkoordinir, dan memelihara tim.

5. *Controller*

Perannya disini adalah sebagai evaluator dan mengaudit untuk kemajuan tim.

Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD Ponggok rutin melakukan Musyawarah Desa (Musdes). Dengan total undangan sebanyak 70 orang yang mencakup tokoh masyarakat (biasanya RT/RW), tokoh agama, masyarakat yang memiliki usaha peternakan, perikanan, dan pertanian. Dan wajib dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ undangan.

“Peserta Musdes akan saya kasih uang untuk pengganti transport biasanya 100 ribu per orang, itu juga biar masyarakat mau hadir untuk memenuhi $\frac{2}{3}$ syarat partisipan” (Hasil FGD Ketua BPD, Juni 2025)

Pelaksanaan Musdes ini didanai oleh Pemerintah Desa, sekitar 16 juta rupiah per Musdes. Dengan total 9-14 Musdes setiap tahunnya. Musyawarah Desa ini membahas masalah-masalah yang terjadi, karena setiap keputusan krusial harus berdasarkan Musdes. Misalnya seperti pada tahun 2017 muncul sebuah isu “Ponggok Dugaan Korupsi”, masalah ini ditelusuri dan diselesaikan melalui Musdes. Kemudian dalam Musdes ini juga terdapat pembahasan terkait transparansi perekonomian desa seperti penetapan RAB Desa di awal periode dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) di akhir periode, serta Dana Desa.

Seiringan dengan perubahan dasar hukum desa ke UU No. 6 Tahun 2014, BUMDes Tirta Mandiri mengusahakan untuk mengambil alih Umbul Ponggok yang dikelola oleh Pokdarwis. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa pendapatan BUMDes melonjak tinggi dari 2014 ke 2015. Setelah pengambilalihan Umbul Ponggok pada tahun 2014, pada tahun 2015 BUMDes Tirta Mandiri merenovasi dan mengembangkan Umbul Ponggok secara besar-besaran sehubungan dengan pencairan dana desa yang pertama. Kemudian, pada

tahun 2015 itu pula Umbul Ponggok dipromosikan dengan penguasaan penuh BUMDes Tirta Mandiri. Hasil ini kemudian terus melonjak tinggi dari tahun ke tahun hingga pada puncaknya di tahun 2018 dengan pendapatan BUMDes mencapai Rp 16 miliar. Adapun BUMDes Tirta Mandiri mendapatkan penghargaan pada tahun 2017 yakni penghargaan BUMDes Terbaik dan Desa Wisata Terbaik dari kategori pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyesuaikan dengan pergantian UU Desa di Indonesia, Pemerintah Desa Ponggok mengubah regulasi mengenai BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2009 ke Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes. Peraturan ini mengakomodasi struktur organisasi BUMDes yang baru dimana penasehat BUMDes adalah Kepala Desa yang menjabat secara *ex-officio*. Seiring dengan pergantian UU Desa, BUMDes Tirta Mandiri melalui hasil FGD mengklaim bahwa mereka adalah badan usaha yang bercirikan desa, namun merupakan badan yang campuran (*hybrid*) antara legalitas berbasis hukum publik (Perdes) dan legalitas berbasis hukum privat (akta notaris).

BUMDes Tirta Mandiri memfokuskan diri pada usaha untuk keuntungan yang sebesar-besarnya, namun tetap mengandalkan masyarakat, Pemerintah Desa, dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui hasil penelitian langsung, ada sekitar 8 (delapan) jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok.

1. PT Umbul Ponggok: pengelolaan destinasi wisata Umbul Ponggok yang merupakan hasil ambil alih dari Pokdarwis pada Tahun 2014.
2. PT Sumber Panguripan: pengelolaan toko Desa yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan swalayan masyarakat.
3. PT Ponggok Ciblon: pengelolaan destinasi wisata kawasan Ponggok Ciblon.
4. PT Banyu Panguripan: pengelolaan Gedung Desa Ponggok.
5. PT Artha Tirta Ponggok: jasa perkreditan untuk masyarakat.
6. PT Bangun Tirta Jaya: jasa konstruksi untuk masyarakat.
7. PT Air Ponggok: pengelolaan air bersih dan air minum dalam kemasan.
8. PT Mina Tirta Mulia: pengelolaan kolam dan perikanan.

Melihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Tirta Mandiri, BUMDes ini berusaha untuk memonopoli kebutuhan masyarakat dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, misalnya seperti jasa persewaan mobil, kolam ikan, kios kuliner, gedung, toko desa, pengelolaan air bersih, jasa simpan pinjam, adapun hal lain seperti *homestay* merupakan di bawah naungan BUMDes Tirta Mandiri.

Masa Revitalisasi 2019 - 2023

Pandemi COVID-19 menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang sangat cepat, sehingga pemerintah Desa Ponggok tidak mampu meresponsnya secara optimal. Akibatnya, terjadi dampak signifikan terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Salah satu implikasinya adalah penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan, dari 101.857 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 27.127 orang pada tahun 2020. Kondisi ini memaksa pemerintah desa untuk segera beradaptasi melalui kebijakan-kebijakan pemulihan, khususnya dalam bentuk revitalisasi sektor pariwisata.

Adaptability (A) dapat didefinisikan sebagai interaksi antara masyarakat dan alam luar, yang menghasilkan sumber daya yang tersedia untuk distribusi sosial (Ritzer, 2001). Parsons membagi masing-masing dari empat kategori AGIL menjadi empat sub-kategori. Sebagai contoh, dalam kasus sub-sistem A, ini dibagi lagi menjadi sub-sistem adaptif (Aa), sub-sistem penetapan tujuan (Ag), sub-sistem integrasi (Ai), dan sub-sistem pemeliharaan pola laten (Al). Proses produksi (Aa) dengan demikian dapat dibedakan dari penetapan tujuan strategis (Ag), integrasi kewirausahaan atas faktor-faktor produksi (Ai), dan nilai-nilai ekonomi (Al). Dengan cara ini, Parsons berupaya, di antaranya, menekankan saling keterhubungan (interpenetration) dari keempat tuntutan atau tantangan fungsional tersebut di seluruh sistem sosial. (Ritzer, 2001). Dalam konteks Desa Ponggok, mayoritas kebijakan yang diambil selama dan setelah pandemi mengarah pada fungsi adaptasi, namun tetap memiliki hubungan erat dengan elemen-elemen AGIL lainnya.

Sebagai pilar ekonomi desa Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri berfokus terhadap adaptasi operasional dan ekonomi. Dalam Sub-sistem Adaptif, BUMDes secara berkelanjutan mengembangkan wahana di Umbul Besuki pada tahun 2023, seperti penambahan area outbound, wisata edukatif, ATV, dan flying fox. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mencegah kejenuhan pengunjung, yang merupakan upaya langsung memperluas wisata. Hal tersebut merupakan akibat dari insentif setelah ada peningkatan pendapatan di tahun 2023. Selain itu, UMKM yang terintegrasi di bawah BUMDes beralih dari penjualan offline ke online sebagai upaya respon terhadap sepi pengunjung, menyesuaikan mode produksi dan distribusi. BUMDes juga mengembangkan SOP baru yang mengintegrasikan protokol kesehatan COVID-19 serta merenovasi infrastruktur dengan fasilitas cuci tangan, pengecek suhu, dan hand sanitizer untuk memungkinkan operasional objek wisata. Aspek sub-sistem adaptif juga tertera dalam digitalisasi pemasaran guna mengkomunikasikan eksistensi desa Ponggok sebagai desa pariwisata dan mempertahankan citra Desa Wisata Ponggok selama pandemi, sementara pemberian bantuan modal Rp 10 juta kepada pelaku UMKM bertujuan

menjaga keberlangsungan usaha mereka. Dalam Sub-sistem *Integration* (Ai). Integrasi Kewirausahaan, pengelolaan UMKM diubah menjadi satu kesatuan di bawah BUMDes untuk distribusi pendapatan lebih adil. Selain itu, terdapat peningkatan kerja sama antara pengelola dan pelaku usaha untuk mengembangkan gagasan kewirausahaan. Langkah ini difasilitasi pengelola dan pelaku usaha setempat, termasuk ibu-ibu pemilik kios beromzet tinggi, guna mengajak UMKM sekitar objek wisata ikut bergabung dalam sistem penjualan online.

Pemerintah Desa Ponggok berfokus pada adaptasi tata kelola dan penyediaan jaring pengaman sosial. Dalam Sub-sistem Adaptif (Aa), Proses Produksi, Pemdes mengalihkan sebagian Dana Desa untuk program BLT-DD sebagai respons krisis ekonomi, menyediakan sumber daya langsung bagi warga. Pemdes juga mengarahkan BUMDes mengembangkan unit air minum kemasan dan pelatihan usaha digital berbasis rumah tangga guna menciptakan jalur produksi baru. Adaptasi layanan publik dilakukan melalui inisiasi platform daring untuk akses administrasi, bantuan sosial, dan pengaduan. Pada Sub-sistem *Goal Attainment* (Ag), program BLT-DD dan diversifikasi ekonomi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga, sementara digitalisasi layanan publik secara eksplisit menargetkan peningkatan efisiensi dan good governance. Pembentukan Satgas COVID-19 beserta penyediaan fasilitas isolasi dan edukasi kesehatan menjadi tujuan vital perlindungan masyarakat. Dalam Sub-sistem Integrasi (Ai), pelaksanaan BLT-DD melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk memastikan akurasi data dan meminimalkan konflik sosial, menunjukkan integrasi elemen masyarakat. Kolaborasi aktif dengan BUMDes dalam diversifikasi usaha dan sinergi Satgas COVID-19 yang melibatkan perangkat desa, karang taruna, dan relawan mencerminkan integrasi kelompok sosial.

BPD berfokus pada adaptasi melalui pengawasan, advokasi, dan pemeliharaan kohesi sosial. Dalam Sub-sistem *Adaptability* (Aa), Proses Produksi, BPD mendorong kebijakan darurat seperti BLT Dana Desa, distribusi bantuan pangan, serta subsidi bagi UMKM dan petani kecil sebagai respons krisis mendesak. BPD juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah desa dalam menjelaskan protokol kesehatan, vaksinasi, serta mekanisme bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi krusial. Dalam sub-sistem *Goal Attainment* (Ag), BPD berkontribusi dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan BUMDes Tirta Mandiri dan Pemdes Ponggok mengemukakan kebijakan adaptif respon untuk COVID-19, selain itu BPD juga aktif mendorong inisiatif ekonomi baru yang dibentuk untuk memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan kemandirian warga desa. Dalam Sub-sistem *Integration* (Ai), pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang intensif (9-14 kali setahun) dan melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti pengajar, tokoh masyarakat, petani, pemuda)

menjadi inti fungsi integrasi BPD dalam pengambilan keputusan adaptif. Mediasi konflik sosial dan penyaluran informasi langsung oleh BPD berkontribusi pada pemeliharaan harmoni sosial. Pada Sub-sistem *Latency* (Al), BPD menjalankan fungsi latency melalui pelestarian nilai gotong royong dan akuntabilitas sosial yang diperkuat dalam Musdes dan relawan COVID-19. Penekanan pada partisipasi dan akuntabilitas, serta tingginya kehadiran masyarakat dalam Musdes, memperkuat budaya partisipasi aktif. Pendekatan persuasif dan berbasis musyawarah BPD membantu meminimalkan resistensi sosial serta meningkatkan partisipasi warga, sehingga melestarikan legitimasi proses pengambilan keputusan desa.

Tabel 1. Hasil Analisis Menurut Teori Parson

Lembaga	Kebijakan	Teori Parson
Pemdes	Pembangunan Infrastruktur	<i>Latency</i>
	Pemetaan Potensi	<i>Goal Attainment</i>
	Pemberdayaan Masyarakat	<i>Integration (2009-2013)</i> <i>Goal Attainment (2014-2018)</i> <i>Adaptation (2019-2023)</i>
	Membangun Sinergi Antar Stakeholder	<i>Integration</i>
	BLT Dana Desa, Bantuan Pangan	<i>Adaptation</i>
	Dana Desa untuk BLT-DD	<i>Adaptation-Adaptation</i>
	Program Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Warga COVID-19	<i>Adaptation-Goal Attainment</i>
	Perumusan Kebijakan Adaptasi Demokratis	<i>Adaptation-Goal Attainment</i>
BPD	Pendirian BUMDes	<i>Goal Attainment</i>
	Musyawarah Desa	<i>Integration</i> <i>Latency</i>
	Perumusan Kebijakan	<i>Adaptation</i>
	Pengawasan, advokasi, dan pemeliharaan kohesi sosial	<i>Adaptation-Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latency</i>
BUMDes	Pengelolaan Wisata	<i>Integration</i>
	Pengembangan Desa Wisata	<i>Integration</i>
	Kerjasama BUMDes dengan Yogyakarta	<i>Integration</i> <i>Goal Attainment</i>
	Perubahan BUMDes Tirta Mandiri menjadi badan <i>hybrid</i>	<i>Adaptation</i> <i>Goal Attainment</i>
	Ambil Alih Umbul Ponggok Yang Awalnya Oleh Kepengurusan Masyarakat Menjadi Kepengurusan BUMDes	<i>Goal Attainment</i>
	Digitalisasi BUMDes dan Marketing Promosional	<i>Adaptation-Adaptation</i>
	Integrasi UMKM	<i>Adaptation-Integration</i>

Sumber: Hasil FGD, Wawancara, dan Observasi (2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari semua hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan mengenai penelitian dan perubahan yang terjadi di Desa Ponggok. Desa Ponggok bisa berubah dikarenakan munculnya aktor yang menjadi

awal titik balik bagi perubahan yang terjadi di desa tersebut, desa tersebut berubah karena inisiasi Kepala Desa Ponggok untuk meminta bantuan kepada mahasiswa UGM agar melakukan pemetaan potensi desa yang mungkin bisa menjadi gerbang keluar desa dari kemiskinan dan hal tersebut dilakukan setelah beliau terpilih pada tahun 2007, pemetaan menjadi poin penting dalam kemajuan desa dan perubahan masyarakat yang pada saat itu masih banyak yang terlilit utang kepada bank keliling dengan bunga yang cukup besar bagi masyarakat yang mendapatkan pendapatan sehari-hari hanya cukup untuk kebutuhan mereka dalam berkegiatan, selain itu juga dibentuknya BUMDes Tirta Mandiri menjadi sebagai badan usaha yang akan mengelola potensi desa yang sudah dipetakan dan didapatkan hasil berupa potensi dari sumber mata air atau yang biasa disebut sebagai umbul. Hal inilah yang menjadi awal dari perubahan yang terjadi di desa tersebut dan juga inisiasi untuk dibentuknya badan usaha yang akan mengelola umbul dan potensi desa yang lain, dibentuknya BUMDes tersebut mempunyai tujuan besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang pada saat itu belum tercapai, dengan adanya inisiasi dan gotong royong antar masyarakat dan juga lembaga desa membantu proses untuk mengembangkan pembangunan yang terjadi di desa tersebut, selain itu juga didukung dengan adanya Dana Desa yang diberikan mulai tahun 2014 membantu pendanaan untuk melaksanakan pengembangan fasilitas yang berada di desa untuk menunjang akses wisatawan dan untuk memberikan kenyamanan yang juga tidak hanya dirasakan oleh wisatawan tetapi juga masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari. Dengan adanya dana desa dan dibantu juga dengan modernisasi yang menjadi tuntutan untuk berdaya saing dengan wisata yang lain membantu mereka untuk dikenal lebih luas oleh masyarakat yang berada di luar pulau untuk datang berkunjung yang turut membantu perekonomian dan pendapatan yang dihasilkan, dengan adanya penghasilan yang besar juga turut membantu proses manajemen pemeliharaan untuk mengganti fasilitas yang sudah usang atau tidak layak lagi untuk digunakan. Dengan adanya pandemic covid-19 juga berdampak bagi wisata yang ada terkhusus bagi Desa Ponggok yang mengalami penurunan dan mereka mencoba untuk memberikan inovasi yang akan menarik kembali wisatawan pasca pandemi yang terjadi dengan melakukan beberapa penambahan fasilitas yang ada di umbul dan juga setelah pasca covid-19 mereka belum kembali mendapatkan momentum untuk bangkit kembali, hal itulah yang sekarang menjadi perhatian bagi BUMDes dan Pemdes untuk kembali mendapatkan momentum untuk kembali bangkit.

DAFTAR REFERENSI

- Disporpar Jateng. (2019). Buku statistik pariwisata Jawa Tengah 2019. [https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1661736026Buku-Statistik-Pariwisata-2019-\(Final\).pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1661736026Buku-Statistik-Pariwisata-2019-(Final).pdf)
- Disporpar Jateng. (2020). Buku statistik pariwisata Jawa Tengah 2020. [https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1661736106Buku-Statistik-Pariwisata-2020-\(Final\).pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1661736106Buku-Statistik-Pariwisata-2020-(Final).pdf)
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran kelembagaan pemerintah desa dalam memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 71-82.
- Parsons, T. (1968). *Structure of social action* (2nd ed., Vol. 1). Free Press.
- Parsons, T. (1991). *The social system*. Routledge.
- Parsons, T., & Mayhew, L. H. (Eds.). (1985). *Talcott Parsons on institutions and social evolution: Selected writings*. University of Chicago Press.
- Peraturan Desa Ponggok Nomor 06 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Putri, L. W., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2023). Manajemen krisis kepariwisataan pada objek wisata Umbul Ponggok dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru di era pandemi Covid-19. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 1-22. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.37770>
- Ritzer, G., & Smart, B. (2001). *Handbook of social theory*. Sage Publications Ltd.
- Setiawan, A. (2019). *Membangun Indonesia dari pinggiran desa*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diambil pada 17 Juni 2025, dari <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670>
- Zakia, R., Angginova, D., Rosyadah, A., Yulaikha, S., Maya, D., & Nihayah, R. H. Y. (2023). Dampak Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: Ponggok Klaten Jawa Tengah. Dalam *Book Chapter: Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Inklusif* (hlm. 140-150).
- Zakiah, U., & Idrus, I. A. (2017). Strategi pengelolaan sumber daya alam Desa Ponggok. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2(2), 84-95.